

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pembangunan manusia adalah sebuah paradigma pembangunan yang mengidentifikasikan manusia sebagai objek dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan pembangunan. Pada awal tahun 1990, menurut pernyataan yang dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP), pembangunan manusia harus didefinisikan sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pernyataan ini menyatakan bahwa untuk menilai keadaan pembangunan manusia di dunia, manusia harus memprioritaskan diri mereka sendiri di setiap tahap, mungkin melalui beberapa proses atau metode yang berbeda. Menurut (Ginting et al. 2023) pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang bertujuan untuk membuat keadaan saat ini menjadi lebih baik di masa depan. Konsep ini juga berlaku untuk pembangunan nasional, di mana perubahan terus-menerus dilakukan di semua aspek masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Paradigma pembangunan manusia berbeda dengan teori pembangunan konvensional lainnya, yang berarti teori pembangunan manusia memandang manusia sebagai input untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah, artinya paradigma pembangunan manusia memposisikan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan alat pembangunan. Salah satu cara untuk

menggambarkan fase pembangunan manusia yang berhasil yaitu bukan dilihat dari kekayaan sumber daya alam yang melimpah, melainkan dilihat dari kualitas individu tersebut ketika menggunakan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa modal dasar pembangunan suatu bangsa yang sesungguhnya adalah manusia tersebut (Arofah and Rohimah 2019). Sumber daya manusia merupakan modal utama bagi proses terselenggaranya pembangunan disuatu wilayah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan di suatu wilayah tidak hanya dibidang pembangunan ekonomi, tetapi juga di bidang pembangunan manusia secara berkesinambungan.

Menurut (Garnella, A. Wahid, and Yulindawati 2020) salah satu indikator pembangunan manusia adalah tingkat kualitas hidup manusia. Kualitas hidup di sini merupakan parameter keberhasilan suatu bangsa yang selanjutnya dikenal sebagai nasional. Pembangunan manusia adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemajuan pengetahuan dalam mengatasi tantangan pembangunan secara global. Pembangunan manusia dalam proses pembangunan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara sosial, pembangunan manusia adalah upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga setiap perbaikan yang terjadi di wilayah yang dijelaskan di atas yang lebih bermanfaat dan dapat diartikan sebagai pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) pada tahun 1990. Sejak saat itu, IPM telah menjadi tolok ukur utama dalam mengukur perkembangan sosial dan ekonomi di berbagai negara.

IPM disusun berdasarkan tiga dimensi utama yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat. Dimensi pertama adalah kesehatan dan umur panjang (*longevity*) yang menunjukkan tingkat harapan hidup penduduk. Dimensi kedua adalah pendidikan (*knowledge*) yang mencerminkan tingkat akses dan pencapaian pendidikan dan dimensi ketiga adalah standar hidup yang layak (*decent living standard*) yang mengukur kesejahteraan ekonomi suatu populasi. Dengan mempertimbangkan ketiga aspek ini, IPM memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah.

Konsep dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan manusia sebagai aset utama suatu bangsa yang berperan dalam mendorong pertumbuhan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut teori ini, tujuan utama pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat umum untuk memiliki pandangan positif, memperoleh pengetahuan, dan menjalani kehidupan yang produktif.

Salah satu pulau terbesar di Indonesia adalah pulau Sumatera, yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional karena sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Meskipun, pembangunan manusia menjadi prioritas dalam pembangunan nasional, namun masih terdapat berbagai permasalahan dalam pencapaian IPM di provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Faktor kesenjangan IPM antar provinsi di Sumatera masih cukup tinggi, dimana provinsi dengan basis ekonomi yang kuat seperti Riau dan Sumatera Utara memiliki IPM yang tinggi, sedangkan provinsi Sumatera Selatan yang juga memiliki basis ekonomi yang kuat, tetapi memiliki IPM yang rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi antar provinsi di Pulau Sumatera.

Pembangunan manusia di Pulau Sumatera perlu diteliti karena beberapa faktor penyebab yaitu pembangunan infrastruktur yang belum merata serta terjadi ketimpangan dari akses kesehatan dan pendidikan antar provinsi. Salah satunya provinsi-provinsi di Pulau Sumatera memiliki perbedaan dalam hal aksesibilitas, infrastruktur, dan penyediaan layanan dasar yang mengacu pada pembangunan manusia. Jika dilihat pada pulau lain seperti Pulau Jawa yang dimana provinsi-provinsi di pulau Jawa memiliki IPM diatas rata-rata nasional, salah satunya adalah provinsi DKI Jakarta yang mencapai IPM sebesar 81,39 pada tahun 2023 dan menjadi provinsi dengan IPM tertinggi di Indonesia. Hal tersebut membandingkan bahwa di pulau Jawa memiliki variasi IPM antar provinsi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan variasi IPM antar provinsi di Sumatera. Hal ini menunjukkan

pembangunan yang lebih merata di pulau Jawa. Kondisi ini semakin berkelanjutan karena kapasitas pemerintah daerah dan anggaran pembangunan yang berbeda.

Enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi fokus penelitian ini menyajikan variasi nilai IPM yang mengindikasikan adanya kesenjangan pembangunan manusia, yaitu pada provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pemilihan keenam provinsi ini didasarkan karena keenam provinsi ini memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Sumatera. Meskipun itu, setiap provinsi juga memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda yang berdampak pada tingkat IPM masing-masing daerah. Ketimpangan IPM antar provinsi di Pulau Sumatera menimbulkan tantangan dalam upaya pemerataan pembangunan.

Gambar 1. 1
Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas menunjukkan perbandingan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di 6 provinsi Pulau Sumatera pada tahun 2019-2023. Salah satunya terlihat di provinsi Sumatera Selatan yang memiliki rata-rata paling rendah sebesar 70,35. Hal ini mengakibatkan permasalahan dalam konteks pembangunan manusia yang dimana provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam provinsi dengan basis ekonomi yang besar, namun memiliki nilai IPM yang rendah. Faktor penyebab utama yang terjadi karena pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendapatan yang masih belum merata di masyarakat serta angka putus sekolah yang sangat tinggi di provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan provinsi Sumatera Utara dan Riau memiliki nilai rata-rata Indeks Pembangunan Manusia yang tinggi sebesar 73,31 dan 73,24. Akan tetapi, masih diharapkan pada tahun berikutnya mengalami peningkatan pada semua provinsi di pulau Sumatera.

Indeks pembangunan manusia menjadi menjadi sangat penting sebagai tolak ukur utama dalam menilai kemajuan suatu negara. Menurut (Arofah and Rohimah 2019) yang berpendapat pada penelitiannya bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai dimensi penting yaitu kesehatan, pengetahuan yang didapat dari pendidikan, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Dimensi dalam mengukur IPM yaitu kesehatan, diwakili oleh angka harapan hidup, pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan ekonomi yang diwakili oleh pengeluaran riil perkapita. Ketiga dimensi ini mencerminkan tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah melalui pengukuran kondisi penduduk yang sehat dan berumur panjang, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki pendapatan yang memungkinkan dapat hidup layak.

Pada penelitian ini beberapa aspek indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Manusia adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, pemenuhan gizi melalui konsumsi kalori dan protein.

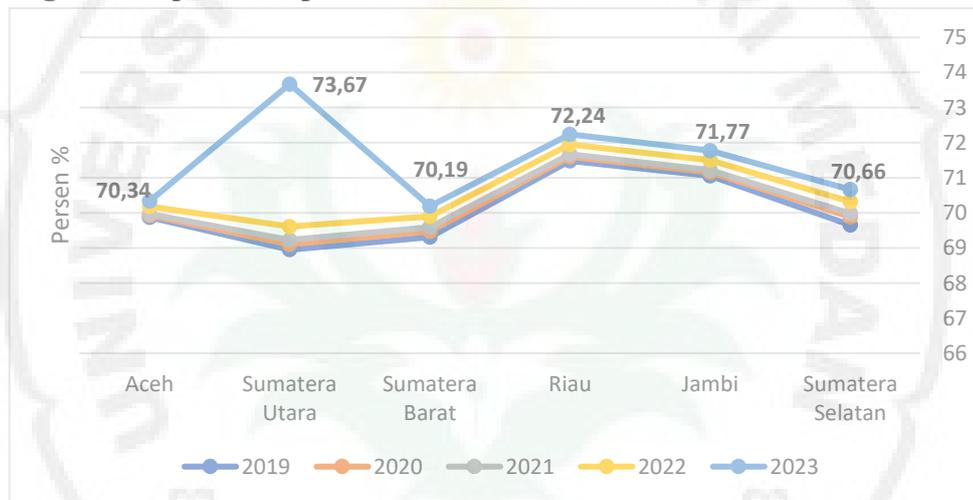
Salah satu aspek indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang digunakan untuk memastikan kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Perbandingan angka harapan hidup diantara provinsi-provinsi di pulau Sumatera menunjukkan adanya perbedaan dalam hal ketersediaan, kualitas layanan kesehatan, dan sanitasi serta faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat secara umum. Tujuan utama dari angka harapan hidup adalah untuk mengatasi kondisi geografis dan infrastruktur kesehatan yang tidak merata di setiap provinsi. Menurut (Ginting et al. 2023) menyatakan angka harapan hidup merupakan fenomena penting yang memengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM). Pembangunan manusia dapat dikatakan belum berhasil apabila pemanfaatan sumber daya masyarakat tidak ditujukan pada pembinaan kesehatan sehingga dapat mencegah seseorang meninggal lebih awal dari yang seharusnya. Dengan demikian, indikator angka harapan hidup ini diharapkan dapat mendeskripsikan umur panjang sekaligus hidup sehat dalam suatu individu (Aulia Febiola 2024).

Menurut (Arofah and Rohimah 2019) menyatakan bahwa dimensi kesehatan menjadi salah satu penentu peningkatan pembangunan suatu negara. Kesehatan juga menjadi tujuan dalam pembangunan manusia yang mendasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator penghitung dimensi kesehatan yang digunakan adalah angka harapan hidup. Dengan meningkatnya angka harapan

hidup dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di suatu negara. Ini menandakan bahwa negara tersebut berhasil mencapai perkembangan positif dalam aspek kesehatan yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 1. 2

Angka Harapan Hidup Di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

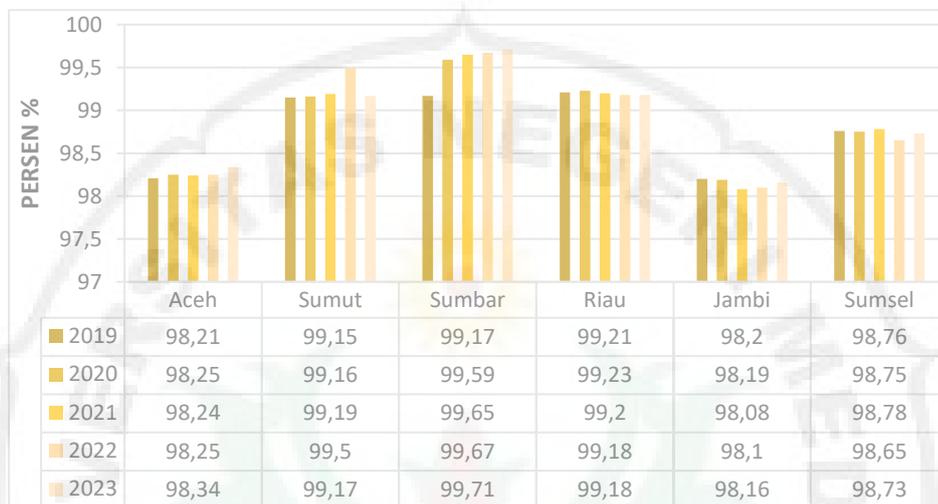
Gambar 1.2 menunjukkan tren peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) di 6 provinsi Pulau Sumatera selama periode 2019-2023. Peningkatan AHH pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dari yang tertinggi berada pada provinsi Sumatera Utara sebesar 4,06%. Kemudian di provinsi Sumatera Selatan juga mengalami kenaikan sebesar 0,34%, akan tetapi presentase pada provinsi Sumatera Selatan tersebut masih tertinggal dan paling rendah diantara provinsi lainnya. Hal ini disebabkan karena akses layanan kesehatan yang masih kurang memadai dan terbatas terutama di wilayah pedesaan, serta infrastruktur kesehatan dan pembangunan yang masih belum merata antar perkotaan dan pedesaan.

Indikator indeks pembangunan manusia lainnya adalah pendidikan yang menjadi alat ukur kualitas dari pembangunan manusia. Menurut (Ismanti 2017) mengatakan bahwa sektor pendidikan merupakan modal utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kinerja sektor pendidikan merupakan salah satu variabel penentu tingkat IPM. Di Pulau Sumatera, permasalahan pendidikan masih sangat kompleks, sehingga menyebabkan rendahnya IPM. Pendidikan yang dikaji dalam penelitian ini adalah variabel angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun keatas menurut wilayah tempat tinggal. (Mursyidah, Wahyuni, and Asrida 2022) berpendapat bahwa angka melek huruf merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat, apabila semakin tinggi orang-orang yang tidak bisa membaca dan menulis maka indeks pembangunan manusia juga akan semakin menurun.

Menurut (Imelda, Balafif, and Wahyuni 2021) pada penelitiannya mengemukakan bahwa pemerintah melakukan kebijakan wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar masyarakat Indonesia menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pendidikan yang diinginkan selanjutnya akan memberikan kontribusi kepada angka melek. Angka melek huruf masih tergolong tinggi mengingat kurang meratanya jumlah sekolah baik dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Menurut (Mursyidah, Wahyuni, and Asrida 2022) mengemukakan bahwa meningkatnya kualitas pendidikan maka akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dapat diterapkan dalam dunia kerja sehingga dan pada akhirnya meningkatkan taraf ekonomi dan taraf hidup.

Gambar 1.3

Angka Melek Huruf Di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2019 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

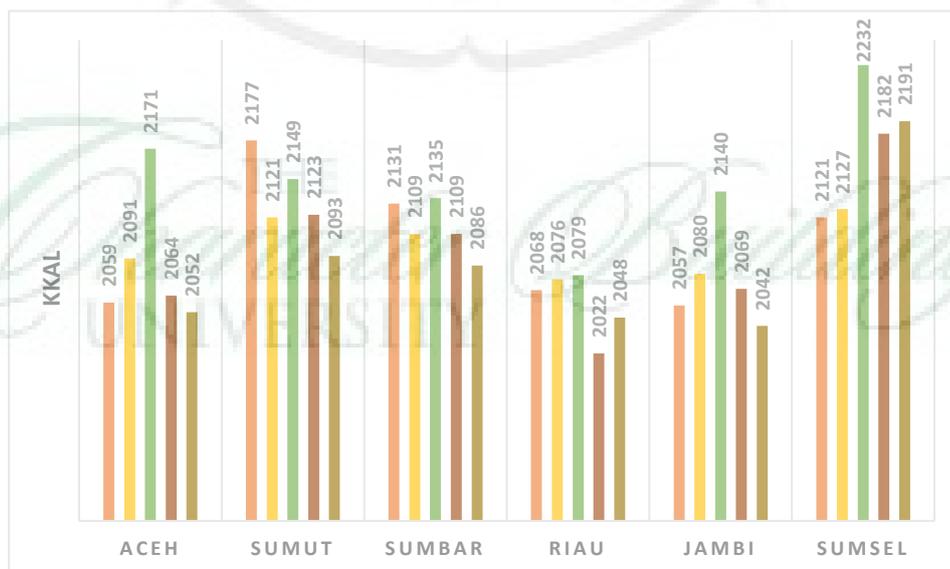
Gambar 1.3 diatas menunjukkan dinamika Angka Melek Huruf (AMH) di 6 provinsi Pulau Sumatera selama periode 2019-2023 yang cenderung fluktuatif. Penyebab terjadinya hal tersebut karena infrastruktur pendidikan yang belum merata antar provinsi serta keterbatasan anggaran dari pemerintah yang menyebabkan fluktuatif pada angka melek huruf di pulau Sumatera. Penurunan Angka Melek Huruf terjadi dalam beberapa tahap, namun penurunan terbesar tercatat di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 sebesar 0,33%. Kondisi ini menyatakan perlunya perhatian serius dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau Sumatera, khususnya dalam hal literasi masyarakat.

Selain aspek pendidikan, kebutuhan kecukupan asupan kalori untuk masyarakat juga menjadi hal yang penting dalam mempengaruhi kinerja IPM suatu negara (Ismanti 2017). Kecukupan asupan gizi seperti konsumsi kalori merupakan

faktor yang sangat kompleks. Konsumsi kalori mempengaruhi banyak sektor, tidak hanya sektor kesehatan. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Penyebab langsung kurangnya konsumsi kalori adalah makan tidak seimbang, baik jumlah dan mutu asupan gizinya. Penyebab tidak langsung adalah kurang tersedianya pangan di rumah tangga. Menurut (Rusliyawati, Suryani, and Ardian 2020) menjelaskan bahwa kalori merupakan suatu nutrisi yang terkandung dalam makanan. Kalori berasal dari makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi seseorang. Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi, yang dihitung berdasarkan besar kalori yang dikonsumsi. Besarnya konsumsi kalori dihitung dengan mengalikan kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori, kemudian hasilnya dijumlahkan.

Gambar 1. 4

Angka Konsumsi Kalori Di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2019 - 2023



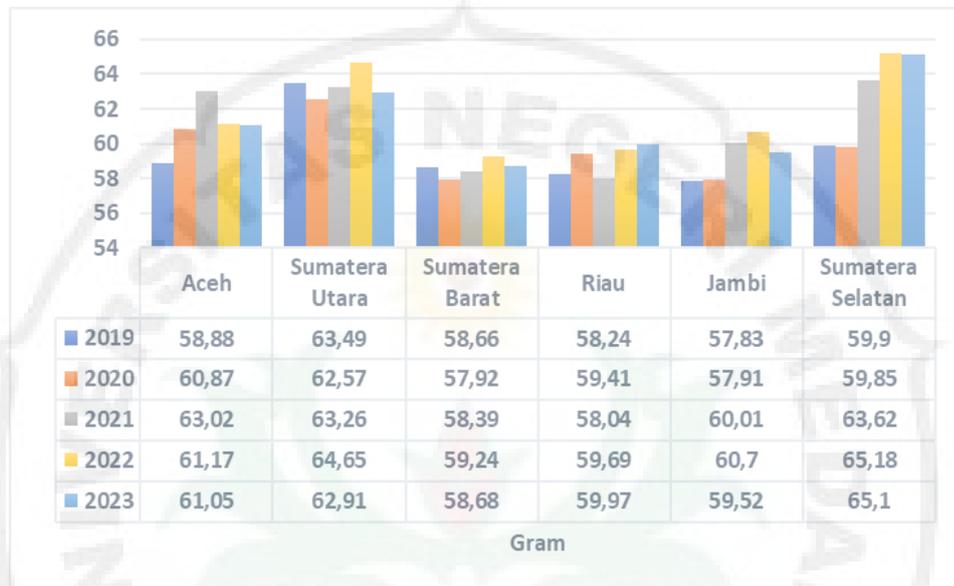
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan pada Gambar 1.4 diatas, menggambarkan fluktuasi konsumsi kalori di 6 provinsi Pulau Sumatera periode 2019-2023 dengan pola yang beragam. Jika dilihat pada standar Kementerian Kesehatan RI tahun 2019 yang menetapkan angka kecukupan kalori sebesar 2.100 kalori per hari, tiga provinsi yakni Aceh, Riau, dan Jambi masih belum mencapai standar tersebut. Penyebabnya adalah distribusi pangan yang belum merata dan belum efisien pada ketiga provinsi tersebut. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya peningkatan konsumsi kalori untuk mencapai standar kecukupan gizi yang ditetapkan.

Aspek selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi kualitas pembangunan manusia adalah kecukupan konsumsi protein. Seseorang dengan gizi yang baik mampu menjadi elemen utama bagi sebuah negara untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan manusia. Menurut (BPS 2021) keterkaitan antara sumber daya manusia yang berkualitas dengan kecukupan asupan protein yang dikonsumsi dapat memberikan cerminan capaian status gizi apakah sudah dapat dikatakan baik. Makanan yang bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan gizi seseorang adalah makanan yang mengandung protein. Menurut (Ismanti 2017) protein sangat dibutuhkan oleh setiap organisme dan mikroorganisme dalam kelangsungan hidupnya karena protein berguna antara lain untuk metabolisme sel, pembentukan jaringan, dan lain-lain. Sehingga seseorang yang kekurangan konsumsi protein berpengaruh pada kinerja tubuhnya yang menurun. Hal ini berarti bahwa tingkat konsumsi protein pada masyarakat juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi IPM suatu wilayah.

Gambar 1. 5

Angka Konsumsi Protein Di 6 Provinsi Pulau Sumatera Tahun 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada Gambar 1.5 diatas menunjukkan dinamika konsumsi protein di 6 provinsi Pulau Sumatera selama periode 2019-2023. Salah satunya yaitu provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kenaikan signifikan 5,33 gram/hari pada 2021-2022, namun terjadi penurunan sebesar 0,07 gram/hari tahun 2023. Jika dilihat pada standar Angka Kecukupan Protein (AKP) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan RI sebesar 57 gram/hari, mayoritas provinsi telah memenuhi standar tersebut. Namun, masih tetap perlu diperhatikan karena mengingat bahwa kecukupan protein merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian komprehensif yang mengintegrasikan antara faktor kesehatan (AHH), pendidikan (AMH), dan gizi (konsumsi protein dan kalori) dalam konteks pembangunan manusia di Pulau Sumatera masih sangat kurang. Penelitian

terdahulu hanya berfokus pada wilayah yang relevan atau menganalisis faktor-faktor tersebut secara ringkas. Salah satunya pada penelitian (Irham 2024) yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPM di Yogyakarta dan di duga bahwa IPM dipengaruhi oleh angka harapan hidup, angka melek huruf, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita. Sedangkan, pada penelitian (Ginting 2023) di duga faktor yang mempengaruhi IPM adalah variabel umur harapan hidup dan harapan lama sekolah.

Variabel dalam penelitian ini yang masih kurang diteliti secara simultan dan diduga berpengaruh terhadap IPM atas dasar teori Nutriion oleh (Robert Fogel 1994) adalah variabel konsumsi kalori dan konsumsi protein. Selain itu, belum ada juga penelitian yang secara khusus membandingkan dampak dari faktor-faktor tersebut di Pulau Sumatera dengan menyoroti karakteristik sosial ekonomi yang berbeda di setiap provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan dimensi konsumsi kalori dan konsumsi protein sebagai variabel kecukupan asupan gizi yang jarang dipertimbangkan dalam studi IPM sebelumnya. Aspek gizi ini menjadi penting mengingat perannya dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, namun seringkali terabaikan dalam analisis pembangunan manusia.

Integrasi variabel ini memberikan perspektif baru dalam memahami determinan IPM di Pulau Sumatera. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam hal cakupan wilayah dengan membandingkan enam provinsi di Sumatera yang memiliki karakteristik berbeda. Analisis komparatif ini memungkinkan identifikasi pola dan faktor-faktor yang berpengaruh secara spesifik

di masing-masing provinsi, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Berdasarkan penjabaran mengenai latar belakang yang ada diatas, dapat diketahui bahwa kualitas pembangunan manusia di 6 provinsi pulau Sumatera masih rendah dan menjadi permasalahan yang perlu di kaji lebih dalam untuk dapat ditemukan solusi dan kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Konsumsi Kalori Dan Protein Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di 6 Provinsi Pulau Sumatera”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah yang ada diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. kesenjangan IPM yang terjadi antar provinsi di Pulau Sumatera yang mempengaruhi kualitas manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi.
2. Angka Harapan Hidup sebagai salah satu komponen IPM menunjukkan variasi dan kesenjangan antar provinsi di Pulau Sumatera yang dapat mencerminkan perbedaan kualitas kesehatan dan fasilitas kesehatan di masing-masing provinsi.
3. Angka Melek Huruf yang mengalami fluktuasi antar provinsi di Pulau Sumatera mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan yang berdampak pada pembangunan manusia.

4. Masih rendahnya tingkat konsumsi kalori di beberapa provinsi di Pulau Sumatera yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan berdampak pada IPM.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asupan protein yang berkualitas, sehingga menyebabkan kualitas pembangunan manusia yang rendah.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pembatasan masalah yang diambil untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis penelitian. Pembatasan masalah tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup 6 provinsi di Pulau Sumatera yaitu provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan.
2. Variabel yang diteliti yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Konsumsi Kalori, Konsumsi Protein, dan Indeks Pembangunan Manusia.
3. Periode tahun digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2019-2023.
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
5. Penelitian ini berfokus pada pengaruh langsung dari variabel dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal lain yang dapat mempengaruhi hasil.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada di atas, maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?
2. Bagaimana pengaruh angka melek huruf terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?
3. Bagaimana pengaruh konsumsi kalori terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?
4. Bagaimana pengaruh konsumsi protein terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?
5. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi kalori dan konsumsi protein secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan dibuatnya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh angka harapan hidup terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?
2. Untuk mengetahui pengaruh angka melek huruf terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?

3. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi kalori terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?
4. Untuk mengetahui pengaruh konsumsi protein terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?
5. Untuk mengetahui pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi kalori dan konsumsi protein secara bersama-sama terhadap indeks pembangunan manusia di 6 Provinsi Pulau Sumatera?

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pembangunan manusia, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) dan mampu dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai indeks pembangunan manusia apabila dikaitkan dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi kalori dan protein.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan di jurusan Ekonomi. Dan memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada peneliti tentang

tentang pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi kalori dan protein terhadap indeks pembangunan manusia.

- b. Bagi masyarakat, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan informasi tentang kondisi angka harapan hidup, angka melek huruf, konsumsi kalori, konsumsi protein dan indeks pembangunan manusia di masing-masing provinsi pulau sumatera, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang bertujuan meningkatkan IPM.
- c. Bagi pemerintah, melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan untuk merancang program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia di pulau sumatera.